

ABSTRAK

Rizki Nurbani Anto. Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau Di Kabupaten Mamuju (dibimbing Muhammad. Tahir oleh dan Riskasari).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan sebuah komponen daerah yang ikut memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan daerah melalui program-program yang dilakukan. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada akuntabilitas pemerintah pada pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau di Kabupaten Mamuju melalui *Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Finansial*. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mengenai pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau Di Kabupaten Mamuju.

Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa yang ada dalam suatu instansi pemerintahan yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas manejerial belum berjalan secara maksimal dikarenakan minimnya anggaran sehingga belum melakukan pembinaan kepada masyarakat (2) akuntabilitas program, pemerintah belum mampu menjalankan program pengelolaan pariwisata hutan bakau seperti penghijauan hutan bakau yang menjadi fokus program pengelolaan wisata hutan bakau dan belum maksimal dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut merawat hutan bakau (3) akuntabilitas finansial, anggaran untuk wisata hutan bakau ini masih sangat minim sehingga pengelolaan wisata hutan bakau belum maksimal atau belum terlaksana sepenuhnya. Semua indikator belum berjalan sesuai dengan SOP yang ada dan juga untuk akuntabilitas finansial yang belum transparan kepada masyarakat.

Keyword: Pelayanan surat izin usaha perdagangan, pelayanan terpadu satu pintu